



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENI KARTIKAWATI
2. Jabatan : KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM
3. NHK : 459629

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.155.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/44 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
2. Tanah Seluas 2986 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. Tanah Seluas 4565 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
7. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
8. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.500.000

1. MOTOR, YAMAHA BEBEK Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, SUZUKI BEBEK Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000



3. MOBIL, HONDA CITY CAR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.192.958.915
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.460.388.192
Sub Total	Rp.	5.956.847.107
III. HUTANG	Rp.	99.417.600
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.857.429.507

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.